



**LAPORAN KINERJA
(LKj) DPMPSTSP
TRIBUNAL II
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Veteran No.72 Lumajang
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444
L U M A J A N G - 67316

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan II ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam menjalankan segala aktifitasnya agar dapat dinilai kinerjanya dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang harus dicapai.

LKj ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun berikutnya yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II ini masih jauh dari sempurna, mengingat latar belakang personil dan pendidikan yang beragam, pengalaman kerja yang masih minim serta kemampuan dalam memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II yang masih belum optimal. Oleh sebab itu saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang, 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.....	2
D. Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>).....	5
E. Dasar Hukum.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Rencana Kerja Tahunanan	15
C. Perjanjian kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Disamping itu LKj merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun

kegagalan pelaksanaan tupoksi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan melembaga. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II adalah untuk memberikan kontribusi baik pada pemerintah daerah maupun pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan maupun kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II adalah untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara jelas kepada publik tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dan merupakan data tertulis agar kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dan dapat dipakai sebagai bahan dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

1. Dasar Hukum penetapan SKPD

Cikal bakal berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai peningkatan status Kantor menjadi Dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Struktur Organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang Kemudian di kuatkan oleh Perda Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan.

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sesuai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan

pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

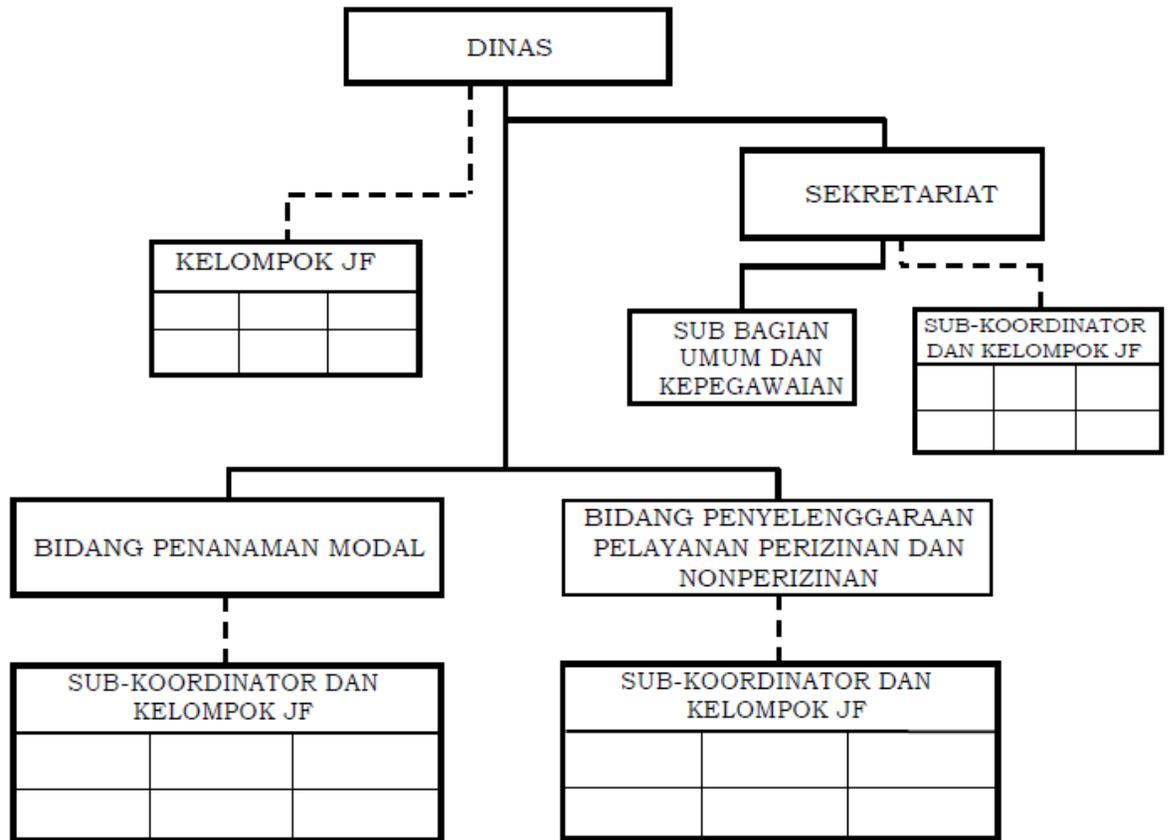
Sedangkan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



D. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Permasalahan pokok pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang pada RPJMD 2018-2023 adalah Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Aparatur Daerah. Dari permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Masalah Pokok DPMPTSP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Masih rendahnya nilai investasi di daerah	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Masih rendahnya iklim investasi dan penanaman modal</div> <div style="padding-top: 5px;">Masih kurangnya upaya promosi penanaman modal</div>

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefiskasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 - 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis dengan menyusun Perubahan Renstra 2018-2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang selama kurun waktu 2018-2023 adalah ***“Meningkat nya Nilai Investasi PMA, PMDN dan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal”***. Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan potensi dan peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1. Visi Kabupaten Lumajang

Visi Kabupaten Lumajang adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”***.

2. Misi Kabupaten Lumajang

Adapun Misi yang mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang tersebut adalah :

Misi Ke 1 yaitu : Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata. Maksudnya meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya

saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, dan jasa pariwisata,serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Misi ke 2 yaitu : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Lebih Sejahtera dan Mandiri. Maksudnya meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inofatif, dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.

Misi Ke 3 yaitu : Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Benar, Dan Bersih (good and clear governance) Yang Berbasis Teknologi Informasi. Maksudnya mewujudkan pemerintah yang baik, benar, dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan, daerah tersebut.

Berdasarkan ketiga misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lumajang, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”** serta berperan secara aktif dalam misi pertama yaitu **” Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata ”**.

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018-2023 menetapkan tujuan yaitu:

Tabel 2.1 Tujuan DPMPTSP

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	201.756,6 Juta

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu Renstra 2018-2023 adalah :

Tabel 2.2 Sasaran DPMPTSP Tahun 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87,50

c. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah. Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang ialah :

- 1). kemudahan akses informasi terkait potensi dan peluang investasi di daerah;
- 2). melakukan upaya promosi dan publikasi tentang perubahan layanan penanaman modal dan perizinan secara elektronik;
- 3). kemudahan akses layanan perizinan yang berbasis elektronik; dan
- 4). Kemudahan akses layanan perizinan dengan membangun suatu tempat pelayanan terpadu yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP).

d. Program

Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
 - a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 2) Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Rencana Kerja Tahunan

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten lumajang kemudian diturunkan dalam target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan), Target Capaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
Meningkatnya nilai Investasi		Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	201.756,6 Juta
	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87,50

Pada Tahun Anggaran 2023 Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	PROGRAM			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15 %	196.586.000
	KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.02.20 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	60 %	41.000.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.000.000
2.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	31.000.000
	KEGIATAN			
2.18.0 2.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun	80 %	155.586.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.202.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	155.586.000
	PROGRAM			
2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Penanaman Modal	201.756,60 Juta	424.474.000
	KEGIATAN			
2.18.03.2 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	424.474.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.03.201.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000
2.18.0 3.201.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan	2 Dokumen	414.474.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
	PROGRAM			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	60 %	405.578.000
	KEGIATAN			
2.18.05.20	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	200 Pelaku Usaha	405.578.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.05.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Pelaku Usaha	271.883.000
2.18.05.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha	133.695.000
	PROGRAM			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90 %	379.027.000
	KEGIATAN			
2.18.04.201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	51 Pelayanan	379.027.000
	SUB KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.04.201.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	353.317.000
2.18.04.201.03	Penyediaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	90 Orang	13.560.000
2.18.04.201.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	2.150.000
	PROGRAM			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	75 %	134.560.000
	KEGIATAN			
2.18.06.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan	51 jenis data layanan perizinan dan non perizinan	134.560.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.06.201.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	4 Dokumen	134.560.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
	PROGRAM			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	3.837.660.126
	KEGIATAN			
X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	14.041.000
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.577.500
X.XX.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.371.750
X.XX.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.091.750
X.XX.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.500.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
X.XX.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	2.500.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.215.307.248
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.163.056.248
X.XX.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.251.000
X.XX.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.500.000
X.XX.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.500.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	3.500.000
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	1.500.000
X.XX.01.203.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	2.000.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
		Daerah pada SKPD		
	KEGIATAN			
X.XX.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	31.100.000
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	31.100.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	320.304.810
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.576.000
X.XX.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	163.921.390
X.XX.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.694.620
X.XX.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.000.000
X.XX.01.206.08	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.207.800
X.XX.01.206.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.000.000
X.XX.01.207	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	112.905.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	571.991.576
	SUB KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
X.XX.01. 207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	541.991.576
X.XX.01.207.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	502.295.291
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.002.500
X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	291.773.991
X.XX.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	209.518.800
	KEGIATAN			
X.XX.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	179.120.201
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	111.970.201
X.XX.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	37.150.000
X.XX.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000

C. Perjanjian kinerja

Tujuan perjanjian kinerja antara lain ialah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan program, sasaran dan kegiatan pada Tahun 2023 menjadi tumpuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Perjanjian Kinerja ini merupakan janji kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Target
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87,50
No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Rumus	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan	$\frac{\text{(Jumlah capaian seluruh kegiatan)}}{\text{(Jumlah$	100 %

No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Rumus	Target
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Perkantoran	kegiatan penunjang) x 100	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	$(\text{Realisasi tahun } n - \text{Target Realisasi tahun } n) / \text{Target Realisasi tahun } n \times 100$	15 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	201.756,60 Juta
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/ atau Pertimbangan Teknis	$\frac{\text{Jumlah permohonan terlayani}}{\text{Jumlah permohonan yang masuk}} \times 100$	90 %
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha tertib LKPM}}{\text{Jumlah pelaku usaha wajib lapor LKPM}} \times 100$	60 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan yang terintegrasi di sistem e-Simpadu}}{\text{Jumlah jenis layanan sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022}} \times 100$	75 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya, adapun capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tribulan I Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya nilai Investasi		Nilai Investasi	201.756,6 Juta	659.733,65 Juta	327%
	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta	1.008,05 Juta	44%
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta	658.725,6 Juta	330%
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,5	86,28	99%

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan II tahun 2023 (data diolah)

Pada Tabel 3.1 disajikan capaian realisasi target sasaran strategis DPMPTSP. Pada tabel tersebut dapat disampaikan bahwa sasaran :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat di Sektor Penanaman Modal dapat disajikan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tribulan I Tahun 2023 dengan nilai indeks 86.28 dimana nilai tersebut belum mencapai target yang dijanjikan

yaitu nilai indeks 87.50 , terdapat 6 unsur yang perlu perbaikan diantaranya unsur persyaratan, prosedur, waktu, spesifikasi, kompetensi layanan dan kualitas sarana prasarana.

2. Meningkatnya nilai investasi PMA masih belum tercapai 100% namun pada perhitungan manual dari penyampaian LKPM telah tercapai 44% dari target yang ditentukan, hal ini dikarenakan masih belum seluruhnya Penanam Modal Asing (PMA) menyampaikan LKPM.
3. Meningkatnya nilai investasi PMDN telah tercapai lebih dari 100% yang didapatkan dari hasil perhitungan manual penyampaian LKPM secara online sampai dengan Juli 2023, hal ini dikarenakan semakin tertibnya penyampaian LKPM oleh Pelaku Usaha khususnya Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pada Tabel 3.2 disajikan capaian realisasi target Program dan Kegiatan DPMPTSP. Pada tabel tersebut terdapat 3 Program dari 6 Program yang telah tercapai sesuai target kinerja yang telah ditentukan pada Triwulan II Tahun 2023 dengan rata-rata capaian diatas 100% yaitu Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sedangkan untuk 3 Program yang lain yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum mencapai target yang ditentukan, namun jika dilihat dari tren capaian kinerja tahun 2022 bahwa untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meningkat drastis pada triwulan III dan IV dimana tingkat ketertiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat pula pada periode tersebut. Untuk Program Penunjang dilihat dari realisasi kinerja dan serapan anggaran telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa capaian tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain :

1. Belum optimalnya kinerja tim percepatan investasi dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lumajang.

2. Belum tersusunnya peta potensi investasi yang dapat diakses secara langsung oleh investor.
3. Banyaknya pelaku usaha yang masih kurang memahami kewajiban dalam pelaksanaan penanaman modal.

Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut :

1. Mengoptimalkan kinerja tim percepatan investasi dengan meningkatkan koordinasi dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lumajang.
2. Melakukan pengusulan penyusunan Peta Potensi Investasi berbasis *Web Geografic Information System* (GIS) pada dokumen perencanaan.
3. Meningkatkan upaya pembinaan terkait pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha.

Tabel 3.2 Capaian Program dan Kegiatan Tribulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	PROGRAM							
2.1 8.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15 %	196.519.000	-28 %	10.800.000	-187%	5,50%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	60 %	41.000.000	0 %	10.800.000	0%	26,34%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
2.1 8.0 2.2 01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	31.000.000	0 Kegiatan Usaha	10.800.000	0%	34,84%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun	80 %	155.519.000	0 %	-	0%	0,00%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	155.519.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
	PROGRAM							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Penanaman Modal	201.756,60 Juta	424.473.500	659.733,7 Juta	7.540.000	327%	1,78%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 3.2 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	424.473.500	0 Orang	7.540.000	0%	1,78%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 3.2 01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	3.415.000	100%	34,15%
2.1 8.0 3.2 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	414.473.500	0 Dokumen	4.125.000	0%	1,00%
	PROGRAM							
2.1 8.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	60 %	365.042.850	7 %	133.453.000	12%	36,56%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 5.2 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	200 Pelaku Usaha	365.042.850	22 Pelaku Usaha	133.453.000	11%	36,56%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 5.2 01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Pelaku Usaha	231.359.850	150 Pelaku Usaha	103.082.500	60%	44,56%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 5.2 01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha	133.683.000	44 Kegiatan Usaha	30.370.500	29%	22,72%
	PROGRAM							
2.1 8.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90 %	369.868.270	100 %	102.711.595	111%	27,77%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 4.2 01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	51 Pelayanan	369.868.270	51 Pelayanan	102.711.595	100%	27,77%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 4.2 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	344.293.270	9491 Pelaku Usaha	101.807.595	316%	29,57%
2.1 8.0 4.2 01. 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	90 Orang	13.425.000	739 Orang	904.000	821%	6,73%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 4.2 01. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	12.150.000	0 Kegiatan Usaha	-	0%	0,00%
	PROGRAM							
2.1 8.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	75 %	134.560.000	84 %	10.200.000	112%	7,58%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 6.2 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan	51 jenis data layanan perizinan dan non perizinan	134.560.000	51 jenis data layanan perizinan dan non perizinan	10.200.000	100%	7,58%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 6.2 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	134.560.000	2 Dokumen	10.200.000	50%	7,58%
	PROGRAM							
2.1 8.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	3.846.229.524	39 %	1.880.208.071	39%	48,88%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	15.290.000	38 %	3.741.500	38%	24,47%
	SUB KEGIATAN							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 1.2 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.410.000	2 Dokumen	2.580.500	67%	75,67%
2.1 8.0 1.2 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.100.000	0 Dokumen	102.000	0%	3,29%
2.1 8.0 1.2 01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
2.1 8.0 1.2 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.500.000	0 Laporan	-	0%	0,00%
2.1 8.0 1.2 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	6.280.000	8 Laporan	1.059.000	50%	16,86%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.211.909.998	66 %	1.280.093.089	66%	57,87%
	SUB KEGIATAN							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 1.2 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.163.056.248	20 Orang/Bulan	1.266.674.339	100%	58,56%
2.1 8.0 1.2 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	45.399.000	3 Dokumen	11.306.000	25%	24,90%
2.1 8.0 1.2 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.499.750	6 Laporan	2.112.750	100%	84,52%
2.1 8.0 1.2 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	955.000	8 Laporan	-	44%	0,00%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	3.353.500	50 %	2.067.200	50%	61,64%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	1.495.000	1 dokumen	880.000	50%	58,86%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 1.2 03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.858.500	6 Laporan	1.187.200	50%	63,88%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100 %	31.100.000	100 %	28.650.000	100%	92,12%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	31.100.000	2 Paket	28.650.000	100%	92,12%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100 %	327.427.127	44 %	184.036.095	44%	56,21%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.549.887	1 Paket	3.962.200	100%	52,48%
2.1 8.0 1.2 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	169.945.702	1 Paket	154.074.300	100%	90,66%
2.1 8.0 1.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.864.038	1 Paket	160.300	100%	1,08%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
06.05								
2.1 8.0 1.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.000.000	18 Dokumen	1.465.000	38%	24,42%
2.1 8.0 1.2 06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.191.500	5 Paket	1.370.000	42%	11,24%
2.1 8.0 1.2 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.150.000	5 Laporan	1.361.400	42%	43,22%
2.1 8.0 1.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	113.726.000	8 Laporan	21.642.895	57%	19,03%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	580.232.451	1 %	110.750.250	1%	19,09%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	550.496.306	1 Unit	110.750.250	1%	20,12%
2.1 8.0 1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	29.736.145	0 Unit	-	0%	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
07.02		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	494.110.000	49 %	207.072.377	49%	41,91%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.060.000	5 Laporan	75.500	42%	7,12%
2.1 8.0 1.2 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	305.370.000	12 Laporan	113.510.527	50%	37,17%
2.1 8.0 1.2 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	187.680.000	42 Laporan	93.486.350	50%	49,81%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	182.806.448	38 %	63.797.560	38%	34,90%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	114.919.600	6 Unit	49.791.182	50%	43,33%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 1.2 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	38.150.000	22 Unit	14.006.378	37%	36,71%
2.1 8.0 1.2 09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.736.848	0 Unit	-	0%	0,00%

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan II tahun 2023 (data diolah)

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja DPMPTSP tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023

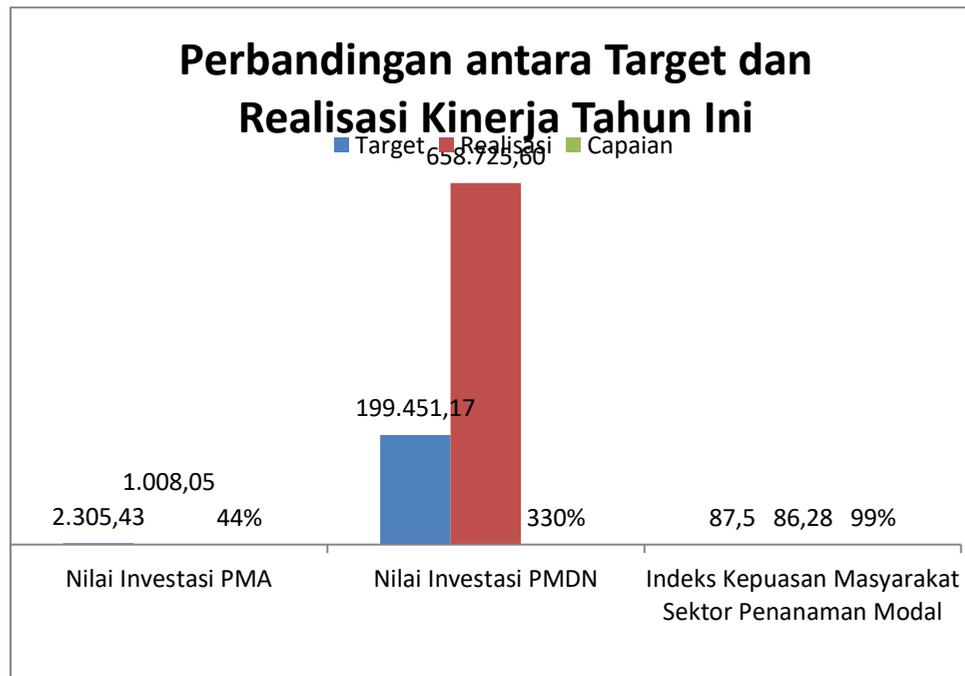
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta	1.008,05 Juta	44%
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	199.451,1 7 Juta	658.725,6 Juta	330%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,50	86,28	99%

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan II tahun 2023 (data diolah)

Pada tabel 3.3 disajikan data perbandingan target capaian kinerja dan realisasi kinerja tahun 2023. Dimana capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal sampai dengan triwulan II belum tercapai sesuai target yang ditentukan yakni masih diangka 99%. Pada Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMA sampai dengan triwulan II belum mencapai target dengan capaian 44%, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama mengalami peningkatan. Pada Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMDN capaian target lebih dari 100% dengan capaian nilai investasi PMDN naik lebih dari 100% dari tahun sebelumnya. Tingkat capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM dengan inovasi Layanan Investasi Keliling Terintegrasi (LILIN) dan penerapan sistem OSS-RBA yang sudah berjalan dengan baik, serta peningkatan sarana prasarana dan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Lumajang.

Gambaran perbandingan antara target, realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP tahun 2019-2023 yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	38.314,5 Juta	1.991,5 Juta	1.384 Juta	31.610,16 Juta	1.008,0 5 Juta	100%	100%	66%	1440%	44%
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	25.114,8 Juta	172.293,4 Juta	59.891 Juta	884.593 Juta	658.72 5,6 Juta	100%	100%	33%	466%	330%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	86,13	86,33	86,57	87,6	86,28	101,33 %	100,38 %	100,08%	100,69%	98,61%

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan II tahun 2023 (data diolah)

Pada tabel 3.4 pada tribulan II tahun 2023 masih belum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN. Pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal capaian sampai dengan Tribulan II tahun 2023 belum mencapai target yang dijanjikan yakni 99% dari target yang dijanjikan.

Gambaran Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023

Rencana kerja tahun 2023 merupakan gradasi dari Rencana Strategis DPMPTSP yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan Tribulan II dengan target P-Renstra 2018-2023 pada tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini.

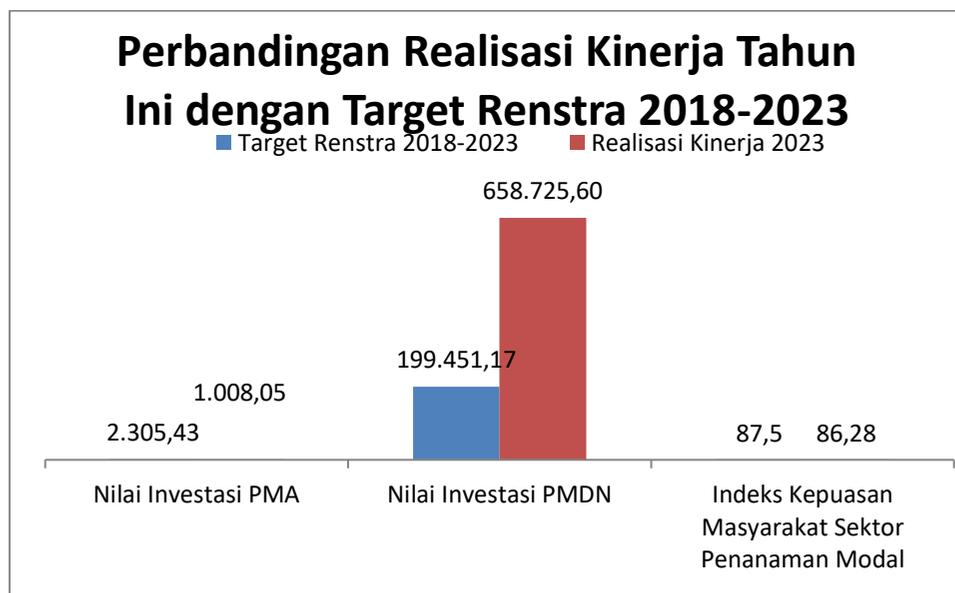
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		
				Target Renstra	Realisasi	C
Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi			201.756,6 Juta	659.733,6 5 Juta	327%
		Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta	1.008,05 Juta	44%
		Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN	199.451,1 7 Juta	658.725,6 Juta	330%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,5	86,28	98,61 %

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan II tahun 2023 (data diolah)

Pada tahun 2023 realisasi kinerja DPMPSTSP dibandingkan dengan target capaian kinerja pada Renstra 2018-2023 terdapat 1 Sasaran yang telah mencapai lebih dari 100% yaitu Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dengan capaian 330%, sedangkan 2 sasaran yang lain masih belum tercapai karena masih dalam proses perhitungan seperti ditampilkan pada tabel 3.5 dan gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standart Nasional

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional	Capaian
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	989,75 Juta	-	-
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	361.839,61 Juta	-	-
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	Dalam proses survei kepada Responden	-	-

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan II tahun 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa indikator kinerja sasaran DPMPTSP tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan capaian DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dikarenakan masih dalam proses perhitungan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan II tahun 2023 terdapat satu target Sasaran Kinerja DPMPTSP telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 dan P-Renstra 2018-2023 dengan capaian kinerja berada diatas 100%. Kenaikan pada capaian disebabkan telah tertibnya pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMA dan sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor

Penanaman Modal sampai dengan Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun dalam mewujudkan capaian kinerja tersebut terdapat faktor-faktor penunjang keberhasilan yang mempengaruhi, antara lain :

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN);
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- d. Penguatan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi;
- e. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah;
- f. Adanya sistem pelayanan berbasis elektronik yang mudah diakses; dan
- g. Performa petugas pelayanan yang baik.

Disamping faktor penunjang keberhasilan terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi disemua sektor unggulan daerah
- b. Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO) / Feasibility Study (FS) yang menunjang kegiatan promosi pada seluruh potensi investasi
- c. Belum tersusunnya peta potensi investasi yang dapat diakses secara langsung oleh investor
- d. Kurang optimalnya peranan Tim Koordinasi Percepatan Investasi dalam melaksanakan Program Kerja yang sudah di susun
- e. Kurangnya informasi masyarakat tentang layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik .

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU dan DAK Non-Fisik. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	5.336.693.144	2.144.912.666	40,19 %
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal			

Dari tabel 3.7 terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang periode Triwulan II Tahun 2023 dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran tahun 2023 sesuai *time schedule*/Rencana Anggaran Kas yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektifitas anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjang dengan keberadaan inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) yang mampu meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Lumajang dan terbangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menunjang efisiensi dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat yang mencakup 18 gerai pelayanan (instansi yang tergabung terdiri dari 7 OPD dan 11 Kementerian/Lembaga dengan 127 jenis layanan).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada periode Triwulan II tahun 2023 terdapat 3 Program yang diampu oleh DPMPTSP telah mencapai target yang ditentukan, dengan capaian rata-rata diatas 100%. Disamping program yang melebihi target terdapat pula beberapa program yang masih belum tercapai, kendala yang dialami adalah masih belum selesainya seluruh kegiatan yang direncanakan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sampai dengan Desember tahun 2023. Program-program tersebut yang telah mencapai lebih dari 100% turut berkontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis dan Tujuan DPMPTSP, dengan capaian Tujuan DPMPTSP sebesar 659 Miliar yang telah melebihi target sebesar 457 Miliar dengan capaian 327%. Capaian tersebut ditunjang langsung oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha secara berkelanjutan guna menjamin kegiatan usaha telah dilakukan sesuai standar dan terselesaikannya hambatan-hambatan yang dialami.

Disamping itu ditunjang pula dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang menyediakan pelayanan penerbitan izin dan non izin, Konsultasi dan Pengaduan. Dimana tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanaman modal yang diterima turut mempengaruhi tingkat kepercayaan penanaman modal untuk berinvestasi di Kabupaten Lumajang. serta didukung dengan sarana dan prasarana penunjang lain yang disediakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari uraian tersebut dapat diambil beberapa faktor penyebab keberhasilan program tersebut adalah :

- a. Adanya komitmen dari Kepala Dinas serta kesigapan petugas pelayanan dalam melayani pemohon dan ketersediaan SP dan SOP yang telah diintegrasikan

dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang teknis.

- b. Adanya Inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) dengan sasaran meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketertiban pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya melalui penyampaian LKPM secara online.
- c. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengintegrasikan instansi perangkat daerah dan kementerian/lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi serta bertanda tangan elektronik yang mampu memberikan percepatan penerbitan izin dan non izin.

Namun terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Belum adanya Peta Potensi Investasi yang mampu menggambarkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Lumajang berbasis GIS.
- b. Mindset pelaku usaha tentang penyampaian LKPM yang memiliki konsekuensi terhadap penagihan pajak sehingga berdampak belum tertibnya penyampaian LKPM.
- c. Belum sinerginya SOP layanan perizinan antar perangkat daerah, sehingga proses rekomendasi teknis membutuhkan waktu yang relatif lama.

8. Permasalahan dan Inovasi DPMPTSP Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Belum tertibnya pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usaha pada aplikasi LKPM online.
- b. Belum adanya peta potensi investasi dari data potensi investasi masing - masing sektor.

- c. Belum tersusunnya I-PRO (Feasibility study) pada potensi investasi yang ada.
- d. Belum optimalnya penyampaian informasi persyaratan dan prosedur layanan yang diberikan
- e. Belum terpenuhinya seluruh sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
- b. Pelayanan Cepat Tanggap (Fast Response) untuk pelayanan jemput bola terjadwal.
- c. Pengembangan fitur peta potensi investasi digital yang terintegrasi dengan website resmi DPMPTSP.
- d. Merencanakan penambahan sarana dan prasarana dalam dokumen perencanaan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala DPMPTSP Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Lumajang untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ialah :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	PROGRAM			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	196.519.000	10.800.000	5,50%
	KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.02.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000	10.800.000	26,34%
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.000.000	-	0,00%
2.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	31.000.000	10.800.000	34,84%
	KEGIATAN			
2.18.02.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	155.519.000	-	0,00%
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.202.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	155.519.000	-	0,00%
	PROGRAM			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	424.473.500	7.540.000	1,78%
	KEGIATAN			
2.18.03.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	424.473.500	7.540.000	1,78%
	SUB KEGIATAN			
2.18.03.201.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000	3.415.000	34,15%
2.18.03.201.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	414.473.500	4.125.000	1,00%
	PROGRAM			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	365.042.850	133.453.000	36,56 %
	KEGIATAN			
2.18.05.201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	365.042.850	133.453.000	36,56%
	SUB KEGIATAN			
2.18.05.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	231.359.850	103.082.500	44,56%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.05. 201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	133.683.000	30.370.500	22,72%
	PROGRAM			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	369.868.270	102.711.595	27,77 %
	KEGIATAN			
2.18.04. 201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	369.868.270	102.711.595	27,77%
	SUB KEGIATAN			
2.18.04. 201.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	344.293.270	101.807.595	29,57%
2.18.04. 201.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	13.425.000	904.000	6,73%
2.18.04. 201.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12.150.000	-	0,00%
	PROGRAM			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	134.560.000	10.200.000	7,58%
	KEGIATAN			
2.18.06. 201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	134.560.000	10.200.000	7,58%
	SUB KEGIATAN			
2.18.06. 201.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	134.560.000	10.200.000	7,58%
	PROGRAM			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.846.229.524	1.880.208.071	48,88 %
	KEGIATAN			
2.18.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.290.000	3.741.500	24,47%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.410.000	2.580.500	75,67%
2.18.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.100.000	102.000	3,29%
2.18.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-	0,00%
2.18.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	-	0,00%
2.18.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.280.000	1.059.000	16,86%
	KEGIATAN			
2.18.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.909.998	1.280.093.089	57,87%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.163.056.248	1.266.674.339	58,56%
2.18.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.399.000	11.306.000	24,90%
2.18.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.750	2.112.750	84,52%
2.18.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	955.000	-	0,00%
	KEGIATAN			
2.18.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.353.500	2.067.200	61,64%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.495.000	880.000	58,86%
2.18.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.858.500	1.187.200	63,88%
	KEGIATAN			
2.18.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.100.000	28.650.000	92,12%
	SUB KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.100.000	28.650.000	92,12%
	KEGIATAN			
2.18.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.427.127	184.036.095	56,21%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.549.887	3.962.200	52,48%
2.18.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.945.702	154.074.300	90,66%
2.18.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.864.038	160.300	1,08%
2.18.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	1.465.000	24,42%
2.18.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	12.191.500	1.370.000	11,24%
2.18.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.150.000	1.361.400	43,22%
2.18.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.726.000	21.642.895	19,03%
	KEGIATAN			
2.18.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.232.451	110.750.250	19,09%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	550.496.306	110.750.250	20,12%
2.18.01.207.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.736.145	-	0,00%
	KEGIATAN			
2.18.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.110.000	207.072.377	41,91%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.060.000	75.500	7,12%
2.18.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.370.000	113.510.527	37,17%
2.18.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.680.000	93.486.350	49,81%
	KEGIATAN			
2.18.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.806.448	63.797.560	34,90%
	SUB KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.919.600	49.791.182	43,33%
2.18.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.150.000	14.006.378	36,71%
2.18.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.736.848	-	0,00%

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran yang disediakan untuk mewujudkan Target Kinerja			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta	1.008,05 Juta	44%	5.336.693.144	2.144.912.666	40,19%	117%
2	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta	658.725,6 Juta	330%				
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,5	86,28	98,61%				

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan II tahun 2023 (data diolah)

Jika dibandingkan sasaran dan indikator kinerja utama tersebut di tahun 2023 rata-rata tercapai lebih dari 100 % (Sangat Baik) dari targetnya sedangkan realisasi anggaran Triwulan II TA. 2023 terealisasi 40,19% atau dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 117%.

Besarnya efisiensi tersebut disebabkan oleh capaian kinerja indikator kinerja utama Nilai Investasi PMDN melebihi ekspektasi yang telah ditargetkan. Berdasarkan capaian tersebut maka perlu dilakukan peninjauan kembali atas target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menghitung peluang penambahan realisasi investasi sampai dengan bulan Desember 2023.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Triwulan II merupakan pertanggungjawaban manajerial, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Kinerja ini memuat hasil yang telah dicapai pada tahun 2023 sampai dengan periode Triwulan II. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II telah menunjukkan peningkatan dengan tercapainya target kinerja pada Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Meskipun dalam perjalanannya terdapat pula permasalahan dan hambatan yang harus ditanggulangi dan ditingkatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hambatan yang dihadapi dan upaya dalam perbaikannya ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

NO	HAMBATAN	UPAYA
1	Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi disemua sektor unggulan daerah	Optimalisasi promosi peluang investasi dengan fokus pada sektor unggulan di Kabupaten Lumajang
2	Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO) / Feasibility Study (FS) yang menunjang kegiatan promosi pada seluruh potensi investasi	Merencanakan dan melakukan penyusunan IPRO/FS pada tahun anggaran berikutnya
3	Belum tersusunnya peta potensi investasi yang dapat	Melakukan penyusunan peta potensi investasi yang dapat

NO	HAMBATAN	UPAYA
	diakses secara langsung oleh investor	diakses secara langsung oleh calon investor
4	Kurang optimalnya peranan Tim Koordinasi Percepatan Investasi dalam melaksanakan Program Kerja yang sudah di susun	Optimalisasi Tim Percepatan Berusaha dengan melakukan evaluasi capaian Program Kerja yang telah disusun
5	Kurangnya informasi masyarakat tentang layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana publikasi informasi layanan Perizinan dan Non Perizinan, serta meningkatkan keandalan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi secara elektronik

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, saran dan kiritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam penyusunan laporan kinerja selanjutnya. Semoga dengan disusunnya laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURCONO, S.STP., M.Si.

19780216 199703 1 001

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARI MURCONO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

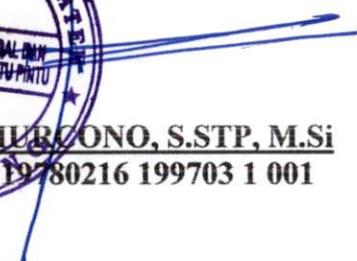
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Pihak Pertama,


ARI MURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Rp. 2.305.433.459
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Rp. 199.451.170.381
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,50
No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Pcnanaman Modal	201.756,60 Juta
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/ atau Pertimbangan Teknis	90 %
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	60 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	75 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA;	Rp. 3.837.660.126	APBD
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL;	Rp. 196.586.000	APBD
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL;	Rp. 424.474.000	APBD
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL;	Rp. 405.578.000	APBD DAN DAK
5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL;	Rp. 379.027.000	APBD
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.	Rp. 134.560.000	APBD

BUPATI LUMAJANG



[Handwritten Signature]

H. THORIQULHAQ, M.ML.

Lumajang, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PILAYAN TERPADU SATU PINTU



[Handwritten Signature]

ARI MURONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001